

DR. H. Inu Kencana Syafie, M.Si.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

STAKAAN
at UMY
madiyah Yogyakarta

.598
ya
s

SI
REVISI

Penerbit
RINEKA CIPTA

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Inu Kencana Syafie, *Haji*
Sistem pemerintahan Indonesia / H. Inu Kencana Syafie.
-- Ed. rev. -- Jakarta :
Rineka Cipta, 2011.
x, 140 hlm. : 24 cm.
Bibliografi : hlm. 138.

ISBN 978-979-518-550-5

1. Politik, Ilmu

I. Judul.

320.1

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

DR. H. Inu Kencana Syafie, M.Si.

Edisi Revisi Cetakan Pertama, April 2011

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian
maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta
Kompleks Perkantoran Mitra Matraman Blok B No. 1-2
Jl. Matraman Raya No. 148 Jakarta 13150
Telp. (021) 85918080, 85918081, 85918142, 85918143

Anggota IKAPI No. 112/DKI/90

Dicetak oleh PT Asdi Mahasatya, Jakarta
RC. No : 16/H/2011

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44
Tentang Hak Cipta**

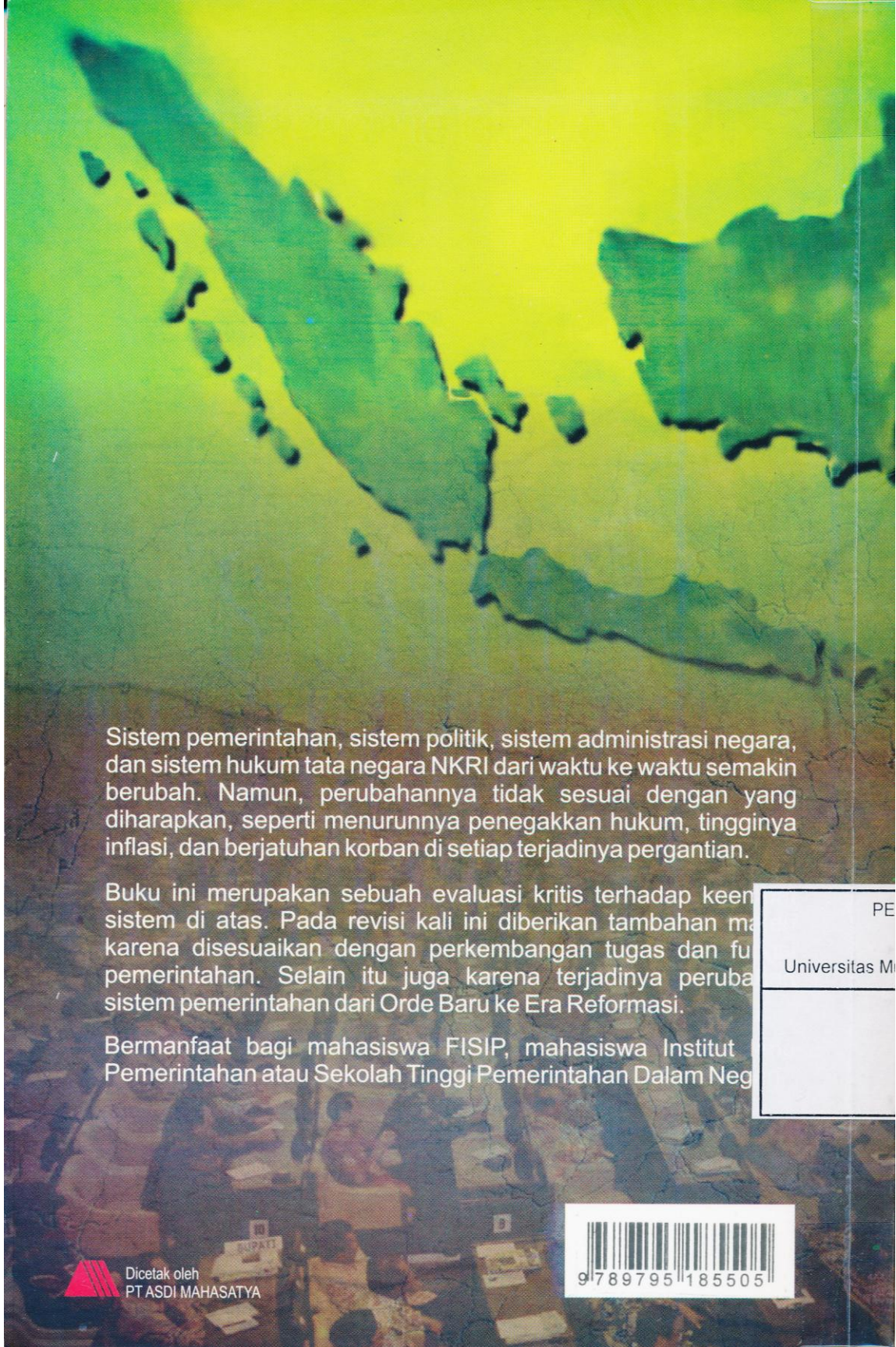
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
KATA PENGANTAR (EDISI REVISI)	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Ilmu	1
B. Pengertian Sistem	4
C. Pengertian Pemerintahan	8
D. Pengertian Negara	11
E. Hubungan Ilmu-ilmu Kenegaraan	13
F. Sistematika Penulisan	14
G. Kesimpulan	16
BAB II SEJARAH INDONESIA	17
A. Umum	17
B. Sebelum Kemerdekaan	20
C. Proklamasi 17 Agustus 1945	23
D. Orde Lama	32
E. Orde Baru	34
F. Kesimpulan	36
BAB III LEMBAGA TINGGI NEGARA	38
A. Presiden	38
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat	40
C. Dewan Perwakilan Daerah	42
D. Dewan Perwakilan Rakyat	43
E. Mahkamah Agung	46
F. Mahkamah Konstitusi	47
G. Komisi Yudisial	48
H. Badan Pemeriksa Keuangan	49
I. Dewan Pertimbangan Agung (Likuidasi)	50
J. Kesimpulan	52

BAB IV HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	53
A. Sejarah Pemerintahan Daerah	53
B. Desentralisasi Pemerintahan	56
C. Sentralisasi Pemerintahan	59
D. Otonomi Daerah	63
E. Kesimpulan	65
BAB V SISTEM PEMERINTAHAN	66
A. Tujuh Kunci Pokok	66
B. Asas Pemerintahan Umum	69
C. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	72
D. Asas Pemerintahan Daerah	73
E. Etika Pemerintahan di Indonesia	75
F. Kesimpulan	77
BAB VI SISTEM POLITIK	78
A. Infrastruktur Politik	78
B. Suprastruktur Politik Indonesia	87
C. Partisipasi dan Komunikasi Politik	92
D. Kebudayaan Politik Indonesia	94
E. Demokrasi Pancasila	102
F. Dwifungsi ABRI dan Keluar Jalur Politik	103
G. Perimbangan Pembangunan Politik dan Ekonomi	105
H. Pemilihan Umum	109
I. Kesimpulan	110
BAB VII SISTEM ADMINISTRASI NEGARA	112
A. Administrasi Negara dan Pembangunan	112
B. Menteri Koordinator dan Menteri Negara	113
C. Organisasi Departemen	114
D. Organisasi Non-Departemen	118
E. Fungsi Manajemen Pemerintahan Indonesia	124
F. Kesimpulan	126
BAB VIII SISTEM HUKUM TATA NEGARA	127
A. Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia	127
B. Konstitusi Indonesia	128
C. Sumber Hukum di Indonesia	130
D. Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis	132
E. Bipatride dan Apatride di Indonesia	133
F. Hak Asasi Manusia di Indonesia	134
G. Kesimpulan	136
DAFTAR PUSTAKA	138



Sistem pemerintahan, sistem politik, sistem administrasi negara, dan sistem hukum tata negara NKRI dari waktu ke waktu semakin berubah. Namun, perubahannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti menurunnya penegakkan hukum, tingginya inflasi, dan berjatuhnya korban di setiap terjadinya pergantian.

Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap keenam sistem di atas. Pada revisi kali ini diberikan tambahan materi karena disesuaikan dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan. Selain itu juga karena terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Era Reformasi.

Bermanfaat bagi mahasiswa FISIP, mahasiswa Institut Pemerintahan atau Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

PE

Universitas M



Dicetak oleh
PT ASDI MAHASATYA

